

JUSTISIA

Bupati Banyuwangi Serap Aspirasi di Rembug Disabilitas

Hariyono - BANYUWANGI.WARTAJUSTISIA.COM

Sep 12, 2024 - 20:48



Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam Rembug Disabilitas yang digelar di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (12/9/2024).

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi rutin menggelar kegiatan Rembug Disabilitas. Ajang yang digunakan oleh Bupati Banyuwangi dalam menyerap aspirasi para disabilitas untuk pengambilan kebijakan pembangunan inklusif ini,

digelar di Kantor Pemkab Banyuwangi dengan diikuti puluhan elemen, Kamis (12/9/2024).

Diantara yang hadir dalam Rembug Disabilitas kali ini yaitu; Perkumpulan Penyandang Disabilitas Daerah (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Juru Bahasa Isyarat, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunanetra Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Forum Peduli Disabilitas, Disable Motorcycle Indonesia, Persatuan Tuli Banyuwangi, UMKM Sahabat dan National Paralympic Committee Indonesia.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, aspirasi dari rekan difabel sangat penting untuk menciptakan kebijakan daerah yang inklusif. Dirinya ingin memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dirancang memfasilitasi semua elemen termasuk rekan disabilitas.

"Karena itu penting untuk mendengar langsung aspirasi rekan-rekan agar kebijakan dan program yang nantinya dirancang benar-benar tepat dan bisa memfasilitasi apa yang memang dibutuhkan. Ada beberapa masukan tersampaikan dalam forum kali ini, seperti usulan perlu dibangunnya fasilitas olahraga bagi disabilitas, papan informasi tuli dan netra, dan fasilitas juru bicara isyarat (JBI) pada setiap kegiatan pemerintah," jelas Ipuk.

Masih kata Ipuk, di bidang kesehatan ada usulan tentang loket khusus disabilitas di fasilitas kesehatan, pelatihan bahasa insyarat bagi nakes dan pelatihan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk kader posyandu. Pada bidang ekonomi, usulan yang datang mengenai pelatihan pemasaran offline dan online bagi UMKM disabilitas, fasilitasi legalitas usaha hingga bantuan promosi pemasaran.

Seperti yang disampaikan oleh Wasis penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki usaha pembuatan makanan ringan. Wasis memberdayakan teman-teman disabilitas sebanyak 20 orang sebagai tim produksinya. Makanan yang diproduksinya adalah camilan kekinian basreng. Selama ini Wasis mengirim bangsreng yang diproduksinya ke pihak ketiga.

"Kami belum memiliki legalitas seperti NIB, PIRT dan sertifikat halal. Kami mohon pendampingan untuk mengurus keperluan tersebut. Karena kalau sudah lengkap legalitasnya ingin mengembangkan usaha juga dengan berjualan langsung ke konsumen," kata Wasis.

Pada kesempatan ini Ipuk langsung memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legalitas produk Wasih. Ipuk meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti semua usulan yang ada. "Terima kasih untuk semua masukan yang diberikan. Aspirasi ini sangat berarti dan akan kami jadikan acuan dan diupayakan maksimal untuk diktindaklanjuti," pungkas Ipuk.

(SUMBER: Humas Kab.Bwi)